

Alain Badiou:

Politik sebagai Kemungkinan Mencapai Kita

Oleh: Bagus Takwin

Politik adalah kemungkinan untuk membebaskan ‘yang kolektif’ dari rezim apapun di luar dirinya. Itu yang saya tangkap sebagai inti pemikiran Badiou tentang politik. ‘Yang kolektif’ saya artikan sebagai kebersamaan dari orang-orang sebagai individu tunggal masing-masing yang menyatukan diri untuk tunduk hanya kepada kebersamaan itu. Politik menjadikannya mungkin. Apapun situasinya, bagi Badiou, selalu ada kemungkinan untuk membebaskan ‘yang kolektif’, selalu ada jalan bagi pencapaian kesetaraan untuk setiap ‘yang tunggal’ (*singular*) dalam ‘yang kolektif’.

Politik yang dirujuk Badiou di sini bukan politik dalam pengertian *politicking* (*le politique; the political*) yang diusung oleh Carl Schmitt atau ekonomi politik yang berkuat dengan manajemen kehidupan sosial yang penuh dengan beragam kepentingan. Bukan juga politik dalam pengertian kajian tentang siapa yang mendapatkan kekuasaan dengan cara-cara tertentu atau tata-cara menjalankan negara. Politik pada Badiou sepadan dengan *la politique* (*politics*), politik sebagai pikiran tunggal, sebagai jenis khas dari pikiran (*thought*), sebagai kajian filsafat.

Filsafat hanya berurusan dengan pikiran dan oleh sebab itu politik sebagai kajian filsafat adalah pikiran. Kepedulian politik dalam arti ini tertuju kepada meta-struktur atau *metapolitics* yang membuat *politicking* atau keputusan-keputusan ekonomi politik dan politik publik menjadi mungkin. Politik di sini harus dipahami dalam makna transendental, melampaui praktek politik sehari-hari, sebagai syarat yang memungkinkan praktek pengaturan orang-orang sebagai kebersamaan.

Antropolog Sylvain Lazarus jadi inspirator Badiou untuk memikirkan ulang politik dan mengembangkan *metapolitics*. Dari Lazarus, Badiou (2005) memahami politik sebagai nama, sebagai singularitas yang ada di luar kategori waktu. Politik dipahami Lazarus sebagai ‘pikiran nominal’, sebagai presentasi yang tak dapat direpresentasi. Politik selalu berurusan dengan pemikiran tentang bagian dalam dari pikiran, tentang

pikiran sebagai dirinya sendiri; politik yang terlepas dari waktu. Ia mengambil tempatnya sendiri di sini dan kini, lepas dari alur sejarah, tampil sebagai keterputusan dengan masa lalu. Berbeda dari pikiran dalam pengetahuan tradisional sejak Hegel hingga filsafat politik kontemporer yang menempatkan sejarah sebagai syaratnya, Lazarus mengeksklusi sejarah. Memakai Lazarus, Badiou memahami politik sebagai kejadian (*l'événement; event*) yang memutus hubungan dengan sejarah, sebagai *singularity* (ketunggalan) baru yang menampilkan dirinya sendiri.

Kejadian Politik

Keterputusan politik dari sejarah bermula pada kejadian. Badiou menunjuk kejadian sebagai peristiwa luar biasa, keterputusan dengan masa lalu, sebuah awal yang absolut. Dunia yang tadinya berisi pengulangan diinterupsi oleh kejadian. Kejadian adalah apa yang pertama kali memungkinkan kebaruan dicapai, yang memungkinkan kebenaran. Pengertian kejadian semacam ini banyak mendapatkan tentangan, terutama karena karakter luar biasanya. Persoalan juga muncul dalam memahami dari mana kejadian berasal, apakah bisa dibina atau difasilitasi munculnya, atau sesuatu yang begitu saja tiba entah dari mana.

Hal-ihwal kejadian memang tidak terlalu jelas. Ada kesan, munculnya kejadian memang misterius. Seperti sebuah puisi tak pernah sungguh dipahami, kejadian mengandung enigma, sesuatu tak bisa dilacak asal-usulnya. Tapi justru ketakterpahaman itu yang menggugah kita untuk terlibat di dalamnya, menerka-nerka, bahkan mempertahankannya. Meminjam Goenawan Mohamad, kejadian adalah “sesuatu yang kelak retak dan kita membuatnya abadi.”

Sejauh pembacaan saya, Badiou tak pernah tuntas menggambarkan kejadian. Ia hanya menyatakan peran kejadian. Menurutnya, agar kebenaran mengafirmasi kebenaran, harus ada sebuah tambahan lain, sebuah suplemen. Tambahan ini adalah kesetiaan kepada kemungkinan, kepada yang tak teramalkan, tak terkalkulasi, kepada apa yang mungkin melampaui itu semua. Itulah kejadian. Kebenaran muncul dalam kebaruannya sebab ada suplemen kejadian yang mengiterupsi pengulangan. Kejadian di sini tak jelas batasnya, apakah itu suplemen yang ditambahkan subjek, artinya ada setelah subjek, atau ada sebelum subjek sehingga subjek bisa setia kepadanya. Saya duga, kejadian dan subjek saling tumpah-tindih. Kejadian sebagai apa yang terjadi di

dunia menghilang sebelum sempat sungguh-sungguh dipahami secara komprehensif. Ada banyak lubang dan retakan pada pemahaman orang tentang kejadian. Daya gugahnya menarik orang untuk mempertahankan dan berpegang padanya sekaligus menambali lubang-lubang dan retakan-retakannya. Gambar kejadian pun lengkap dalam pemahaman orang yang setia berpegang padanya. Dengan gambar itu orang akhir akhirnya orang menjadikan kejadian sebagai bagian yang bertahan di dunia.

Barangkali, kuantitas tunggal dari kejadian yang membuatnya tak bisa didefinisikan sehingga sulit mengenali batas-batasnya tanpa menunjuk langsung wujudnya dalam kenyataan. Badiou hanya memberikan contoh-contoh kepada kita dengan menunjuk kepada munculnya tragedi teatrikal dengan Aeschylus, berubahnya fisika matematik bersama Galileo, Revolusi Prancis, dan cinta antara dua orang yang malampui orientasi seksual yang hendak dipertahankan sampai mati. Kejadian semacam itu, tegas Badiou, ada dalam sejarah meski tak jelas bagaimana melacak jejak-jejak kemunculannya. Kejadian, meminjam matematika, adalah peristiwa aksiomatik, sebuah pilihan yang menunjuk kepada situasi khusus.

Lalu apa itu kejadian politik? Dalam *Metapolitics* Badiou (2005: 141) menulis:

"An event is political if the material is collective, or if the event can only be attributed to a collective multiplicity. 'Collective' is not a numerical concept here. We say that the event is ontologically collective to extent that it provides the vehicle for virtual summoning of all. 'Collective' means immediately universalising. The effectiveness of the politics relates to the affirmation according to which 'for every x, there is thought'."

Kejadian politik selalu bersifat kolektif; politik selalu melibatkan banyak orang. Orang-orang itu memiliki pikiran yang sama; pikiran dalam arti prosedur kebenaran yang dipahami sebagai subjektivitas. Dalam politik, pikiran itu ada pada semua orang dalam 'yang kolektif'. Kalau hanya ada pada satu atau dua orang saja, kita tidak bisa sebut itu pikiran politik. Pikiran politik niscaya dialamatkan kepada semua yang tercakup dalam 'yang kolektif', tidak hanya kepada sebagian. Kebenaran politik pun adalah kebenaran bagi 'yang kolektif', bukan untuk sebagian.

Pikiran dan kebenaran dalam politik berbeda dengan pikiran dalam seni, cinta atau sains. Hanya politik yang secara intrinsik mensyaratkan pikiran untuk dideklarasikan kepada semua yang tercakup dalam 'yang kolektif'. Pikiran politik itu ditujukan untuk semua orang, untuk meuniversalkan singularitasnya.

Kejadian politik tentu saja melibatkan banyak tindakan dari banyak orang, kecil

maupun besar. Partisipasi dari orang-orang yang terlibat dalam 'yang kolektif' menjadi syarat dari politik. Jika tidak, itu hanya usaha segelintir atau sebagian orang, bukan keseluruhan. Di dalamnya, ada tindakan pidato, membuat konsep, memasak di dapur umum, memilih calon yang dianggap mampu, menyebarkan poster, dan sebagainya. Itu juga terjadi dalam kejadian-kejadian politik yang tercatat dalam sejarah, tetapi itu semua tak lain demi mewujudkan pikiran. Kita bisa baca, dalam contoh-contoh yang dirujuk Badiou beragam kegiatan dilakukan dalam usaha mewujudkan pikiran kesetaraan, untuk mencapai kebebasan 'yang kolektif' dari rezim-rezim di luar dirinya.

Dasar Ontologis Bagi Politik

Ontologi Badiou memberikan dasar bagi perumusan politik sebagai kemungkinan sekaligus menjelakan mengapa kejadian adalah awal yang absolut. Berangkat dari perumusan 'Ada' (*being*) sebagai situasi, kumpulan kemajemukan yang majemuk (*multiple multiplicity*), Badiou (2005) membangun pemikirannya tentang kemungkinan-kemungkinan menata kemajemukan dengan cara baru dan menghasilkan kemajemukan yang baru.

Kebaruan, sejauh pemahaman saya terhadap Badiou, merupakan kata kunci dari berbagai usaha manusia sebagai subjek untuk mencapai kebenaran. Kebaruan di sini, dengan kerangka ontologi Badiou, dipahami sebagai kebaruan situasi, kebaruan kemajemukan yang majemuk. Dengan merumuskan 'Ada' sebagai situasi, Badiou tidak menunjuk kepada kebaruan material, melainkan kebaruan situasi. 'Ada' bukan yang tunggal, juga bukan yang majemuk. 'Ada' adalah sekaligus yang satu dan majemuk.

Setiap 'Ada' mengandung yang tunggal dan yang majemuk sekaligus, dan situasi jadi istilah yang tepat untuk mewakilinya. Situasi merupakan representasi dari presentasi, perwakilan berbagai presentasi dari beragam yang tunggal hasil operasi 'hitungan-sebagai-satu' (*count-as-one*). Operasi ini merupakan metastruktur, struktur dari struktur. Setiap situasi mempresentasi unsur-unsurnya sebagai struktur masing-masing. Lalu, unsur-unsur itu dihitung-sebagai-satu, distrukturisasi menjadi struktur lebih besar yang merepresentasi situasi.

Situasi yang baru atau 'Ada' yang baru adalah situasi yang dihitung-sebagai-satu secara baru sehingga memiliki struktur baru. Kebaruan terletak pada operasi ini, struktur baru dari situasi hasil dari hitungan-sebagai-satu yang baru. Jadi, 'Ada' yang

baru adalah situasi yang baru, kemajemukan yang baru.

Kejadian dalam pemahaman Badiou adalah suplemen bagi terjadinya kebaruan, bagi kemajemukan yang baru. Kejadian merupakan awal absolut dari situasi yang baru. Dengan adanya kejadian, situasi lama yang merupakan metastruktur diurai sedemikian rupa lalu distrukturisasi lagi untuk menghasilkan struktur situasi yang baru, dengan kata lain menghasilkan situasi yang baru, 'Ada' yang baru.

Orang-orang yang memiliki keyakinan (*fidelity*) terhadap kejadian sebagai penghasil struktur baru itu dalam terminologi Badiou disebut subjek. Dengan keyakinannya mereka mempertahankan kejadian sehingga kebaruan terwujud. Proses mempertahankan kejadian sehingga mewujudkan situasi baru disebut Badiou sebagai proses kebenaran.

Politik oleh Badiou dipahami dengan dasar ontologinya ini. Kejadian politik muncul sebagai awal absolut dari situasi kolektif baru. Kasarnya, situasi tempat 'yang kolektif' terhimpun di bawah metastruktur lama diurai sedemikian rupa untuk menghasilkan situasi baru yang bercirikan 'yang kolektif' mengelola dirinya sendiri, bebas dari rezim di luar dirinya.

Politik, Keadilan dan Pikiran

Badiou menyebut keadilan sebagai fokus utama dari politik. Keadilan merupakan ciri utama pengelolaan 'yang kolektif' secara egaliter. 'Politik yang adil' jadi ihwal utama dalam ranah pemikiran politik sejak Plato hingga kini. Persoalannya, keadilan bukan sesuatu yang terungkap dengan jelas. Keadilan selalu merujuk pada keadaan tunggal, tak bisa diperbandingkan dan tak bisa didefinisikan. Keadilan dapat ditunjukkan sebagai presentasi tetapi tak dapat digeneralisasi. Tak ada representasi yang dapat mewakilinya. Memikirkan politik dengan berangkat dari rumusan pengertian keadilan tertentu akan menghasilkan pemikiran yang mereduksi keadilan sebatas pengertian itu, bukan keadilan yang memaparkan dirinya sendiri.

Bagi Badiou, titik berangkat pemikiran politik semestinya "ketidakadilan jelas" sebab mudah bagi kita mengenali ketidakadilan. Orang bisa menunjuk berbagai ketidakadilan. Efek ketidakadilan juga dapat dikenali. Kita bisa menunjuk penderitaan dan revolusi sebagai efek ketidakadilan. Penderitaan lahir dari situasi yang mengandung ketidakadilan. Revolusi di satu sisi merupakan usaha untuk menghilangkan

ketidakadilan, di sisi lain merupakan usaha untuk mencapai keadilan.

Namun, keadilan tidak bisa diartikan sebagai tiadanya ketidakadilan. Badiou juga tidak berpikir bahwa ketidakadilan dapat ditemukan di sisi yang dapat dipersepsi atau dialami atau pada yang subjektif, sementara keadilan ada di sisi yang dapat dipikirkan atau pada nalar atau pada yang objektif. Ketidakadilan bukan kekacauan yang dapat dikenali langsung sebagai situasi yang menuntut keadilan menyediakan keteraturan di dalamnya.

Dalam esai "*Philosophy and Politics*" yang terkumpul dalam *Infinite Thought*, Badiou (2003: 69-70) mengistilahkan keadilan sebagai "...the name by which philosophy designate the possible truth of political orientation." Keadilan merupakan kata yang diambil dari filsafat. Tetapi, dalam filsafat pun kata ini bersyarat. Keadilan bermakna jika dan hanya jika digunakan dalam konteks hidup bersama, dalam konteks politik (mengambil istilah politik yang akarnya *polis*). Ini yang menjadikan keadilan sebagai nama yang diterakan oleh filsafat bagi kebenaran orientasi politik.

Kita tahu, filsafat adalah ikhtiar untuk memperoleh kebenaran, sebuah kecintaan terhadap kebenaran. Hasrat utamanya adalah kebenaran. Dari situ kita paham, keadilan sebagai kata dalam filsafat yang mensyaratkan politik pun berkaitan erat dengan kebenaran. Bila kita ingat Etika Eudaimonisme dari Sokrates, Plato dan Aristoteles maka kita jadi paham bahwa akar politik adalah pencapaian tujuan hidup manusia untuk memandangi kebenaran. Politik atau tata-cara kehidupan dalam *polis* merupakan alat untuk mencapai kebenaran, prosedur untuk mencapai kebenaran. Pengenalan kebenaran sebagai tujuan hidup tak bisa dicapai sendiri-sendiri, harus dilakukan dalam kehidupan bersama, dalam 'yang kolektif'. Saya kira pemikiran politik Badiou mendapat inspirasi dari situ: politik sebagai upaya yang kolektif mencapai kebenaran.

Dewasa ini, agak janggal rasanya mengaitkan politik dengan kebenaran. Mayoritas orientasi politik empirik tak punya urusan dengan kebenaran. Ini yang dicerca Badiou. Dalam penilaian Badiou, mereka yang terlibat dalam politik saat ini lebih memilih mengorganisasi percampuran menjijikan kekuasaan dan opini. Subjektivitas yang terlibat di dalamnya berkisar pada suku dan lobi, nihilisme elektoral dan konfrontasi buta antar komunitas. Saya tidak tahu dari mana kegeraman Badiou terhadap praktek politik kontemporer berasal. Mungkin apa yang terjadi di Prancis

menjadi bahan penilaiannya. Yang jelas, Badiou menolak praktek politik macam itu. Ia memilih filsafat sebagai kerangka pikir untuk memahami politik. Filsafat tak berurusan dengan praktek politik itu; tak mengurus politik yang tampil tidak sebagai pikiran. Filsafat hanya memikirkan pikiran (*thought*). Sedangkan sejauh yang dikenali Badiou, dalam berbagai orientasi politik yang ada dewasa ini, satu-satunya unsur subjektif yang dianggap penting adalah kepentingan (*interest*). Pikiran tidak dianggap penting di sana dan oleh sebab itu filsafat tak berurusan dengan itu.

Dari sini, kita bisa menelusuri pemikiran politik Badiou. Ia meletakkan politik sebagai kajian filsafat, sebagai pikiran. Bukan politik sebagai praktek semata, bukan juga hanya sebagai teori, melainkan sebagai pikiran. Dengan memahami politik sebagai pikiran berarti memahami politik sekaligus sebagai perpaduan tak terpisahkan dari teori dan praktek, di dalamnya sudah tercakup teori dan praktek. Badiou menentang partai-partai politik yang melulu berorientasi pada praktek. Ia juga menyerang filsafat dan teori politik yang menempatkan politik melulu sebagai teori dengan mengajukan tesis politik sebagai pikiran. Politik adalah pikiran dalam tindakan dan tindakan yang didasari pikiran. Ini mengingatkan saya kepada '*praxis*' yang pengertiannya bertentangan dengan teori tetapi sekaligus mensyaratkan adanya kerangka pikir yang mendasari tindakan. Politik sebagai *praxis*, saya kira, merupakan jejak-jejak Marxisme dalam pemikiran Badiou.

Pengertian pikiran di sini perlu diperjelas. Kita bisa dapatkan itu dalam karya Badiou (2005) *Metapolitics*. Dengan istilah "pikiran" ("*thought*") ia merujuk kepada setiap prosedur kebenaran yang dipahami sebagai subjektivitas (*prise en subjectivité*). Menurutnya, "*Thought is the name of the subject of a procedure of truth.*" Saya kira ini juga mengambil pemikiran dari Heidegger tentang berpikir. Bagi Heidegger, berpikir harus dilakukan sesuai dengan keunikan dari objek yang dipikirkan. Berpikir tidak didominasi atau didasari oleh metode tertentu. Berpikir tentang suatu objek berarti memahami objek itu, sepenuhnya terbuka terhadap objek itu. Kalau kita pakai pengertian ini dalam konteks pembahasan tentang politik maka politik sebagai pikiran merujuk kepada politik sebagai prosedur kebenaran, sebagai subjek dari prosedur kebenaran dalam politik.

Pikiran dan kebenaran selalu bergandengan dalam paparan-paparan pemikiran Badiou. Kita dapatkan alasannya dalam kutipan dari Badiou (2003: 73), "*Thought is the*

specific mode by which a human animal is traversed and overcome by a truth.” Pikiran sebagai prosedur kebenaran subjektif adalah mode khusus untuk menggerakkan manusia mencapai sesuatu yang baru. Dan kebenaran selalu merupakan sesuatu yang baru. Manusia melewati bergerak dari satu ranah ke ranah lain, melampaui berbagai rintangan untuk mencapai situasi baru dengan pikiran.

Politik sebagai pikiran, dengan demikian, merupakan mode khusus untuk mencapai situasi baru, sebagai prosedur kebenaran. Saya akan bahas lebih rinci tentang ini nanti. Sekarang saya masih mau membahas politik sebagai kajian filsafat.

Jika kenyataannya, berbagai orientasi politik yang ada dalam kenyataan dewasa ini tidak menempatkan politik sebagai pikiran, sebagai hal yang berurusan dengan kebenaran, apakah masih mungkin adanya orientasi politik yang terkait dengan kebenaran? Badiou melihat pada sejarah. Secara historis, ada beberapa orientasi politik yang punya koneksi dengan kebenaran; kebenaran dari ‘yang kolektif’. Orientasi seperti itu memang jarang dan beberapa di antaranya berumur pendek, tetapi pernah ada dan mungkin ada lagi secara aktual. Meski jarang, mereka bisa bertindak sebagai kondisi yang memungkinkan pemikiran filsafat tentang politik.

Sebagai peristiwa, orientasi-orientasi itu merupakan ketunggalan (*singularity*), tetapi filsafat dapat mengenali ciri umum di antara mereka. Ciri umum itu terletak pada orang-orang yang melibatkan diri di dalamnya. Mereka melibatkan diri dengan syarat kemanusiaan generik yang dipegang teguh, tanpa kepentingan khusus di luar itu. Yang mereka perjuangkan adalah representasi dari kapasitas kolektif yang merujuk kepada agen-agennya dengan seketat mungkin berpatokan kepada kesetaraan.

Dengan istilah kesetaraan di sini Badiou menjelaskan bahwa aktor politik diwakili oleh tanda dari kapasitas manusiawi yang khas saja. Kapasitas khas manusia itu terletak pada pikiran. Kepentingan yang jadi tanda bagi kebanyakan orientasi politik dewasa ini bukan kapasitas khas manusia. Semua makhluk hidup melindungi kepentingannya sebagai imperatif untuk bertahan hidup. Tetapi pikiran hanya ada pada manusia. Pikiran tidak lain dari modus khas yang ada pada manusia untuk mencapai kebenaran dan menggerakkan manusia mencapai kebaruan.

Kemampuan berpikir, dengan begitu, menjadi kategori yang menentukan kesetaraan dalam politik. Keadilan sebagai nama yang diterakan oleh filsafat bagi kebenaran orientasi politik dengan kesetaraan sebagai patokannya pun menggunakan

dasar kemampuan berpikir bagi perwujudannya. Bagi Badiou, agar sebuah orientasi politik berharga diajukan sebagai filsafat di bawah ide keadilan, maka aksioma umum unik yang diperlukan adalah “orang-orang berpikir”, orang-orang mampu mencapai kebenaran dengan pikirannya. Tanpa aksioma ini, politik tak mungkin bisa dijalankan. Politik sebagai pikiran, sebagai mode khusus untuk mencapai situasi baru, sebagai prosedur kebenaran, hanya mungkin dengan mengandaikan orang-orang berpikir dan dapat mencapai kebenaran. Aksioma ini menjadi prinsip egalitarian tentang kapasitas untuk mengenali yang adil atau yang baik.

Revolusi Prancis dan Revolusi Kebudayaan Cina memberi Badiou (2003) contoh aksioma egalitarian. Di bulan April 1794, Saint-Just mendefinisikan ‘kesadaran publik’, “*May you have a public consciousness, for all hearts are equal as to sentiment of good and bad, and this consciousness is made up of the tendency of the people toward the general good.*” Dari Revolusi Kebudayaan Cina, Badiou mengambil petikan pidato Mao Tse-tung, “*Let the masses educate themselves in this great revolutionary movement, let them determine themselves the distinction between what is just and what is not.*” Bagi Badiou, sebuah orientasi politik menyentuh kebenaran dengan prinsip egalitarian. Saint-Just dan Mao Tse-tung merumuskan itu dalam revolusi mereka masing-masing dan itu menjadikan Revolusi Prancis dan Revolusi kebudayaan sebagai kejadian kebenaran politik.

Badiou mengingatkan bahwa kesetaraan tidak merujuk kepada sesuatu yang objektif seperti status, penghasilan, fungsi atau kontrak sosial yang menempatkan orang-orang yang terlibat sebagai pihak-pihak yang setara. Kesetaraan menurut Badiou bersifat subjektif; kesetaraan dengan respek terhadap kesadaran publik untuk Saint-Just atau dengan respek terhadap pergerakan massa politis pada ucapan Mao. Kesetaraan adalah *maxim* politik, sebuah preskripsi, aturan yang ditegakkan untuk mencapai pembebasan ‘yang kolektif’ dari rezim-rezim di luar dirinya. Kesetaraan politik bukan sesuatu yang direncanakan, bukan program sosial. Ia adalah, mengutip Badiou (2003:72) “*...what we declare under fire of event, here and now, as what it is, and not as what should be.*” Paralel dengan kesetaraan, keadilan juga tidak bisa jadi program sosial atau program negara. Badiou (2003:72) menegaskan, keadilan adalah “*... the qualification of an egalitarian political orientation in act.*”

Keadilan yang merupakan nama filosofis untuk *maxim* egalitarian politik tak dapat didefinisikan, tak dapat diwakili, sebab kesetaraan adalah aksioma dari tindakan,

bukan tujuan. Tak ada tanda yang merujuk kepada keadilan, ia menampilkan dirinya sendiri. Keadilan selalu merupakan presentasi, bukan representasi. Keadilan, Badiou menambah aksioma, “...is nothing other than one of the words by which a philosophy attempts to seize the egalitarian axiom inherent in a veritable political sequence.” Aksioma ini menggunakan pernyataan singular, memberikan karakteristik singular dari alur pencapaian keadilan, sebagai presentasi. Ia hadir dalam pernyataan politik atau tidak sama sekali. Konsekuensinya, cuma dua pilihan: kita dalam keadilan atau tidak sama sekali; juga: ada politik atau tidak ada sama sekali.

Politik, dalam pengertian Badiou, tidak bisa ditemukan dalam negara karena negara bukan figur subjektif dan aksiomatik. Negara tak berurusan dengan keadilan atau kebenaran. Keberadaannya hanya memenuhi fungsi-fungsi tertentu atau sebagai keterampilan membuat konsensus. Dimensi subjektif negara sebatas transformasi keniscayaan ekonomi yang bekerja dengan logika modal. Keadilan dalam negara direduksi menjadi harmonisasi dari tarik-menarik antar kepentingan. Padahal, keadilan yang secara teoritis merupakan nama untuk aksioma kesetaraan secara niscaya merujuk kepada subjektivitas yang lepas dari kepentingan, bebas dari logika modal.

Bagi Badiou, mengambil jarak dari negara berarti juga mengambil jarak dari ekonomi. Politik yang bersentuhan dengan kebenaran harus berjarak dengan ekonomi sebab hanya ada ekonomi kapitalis. Kebijakan yang diambil dengan pengandaian bahwa keadilan ekonomi sebagai keniscayaan hanyalah politik reaksioner, bukan politik sebagai perwujudan keadilan. Tetapi, emansipasi politik tak dapat mengelak dari kedigdayaan ekonomi kapitalis. Ia harus berhadapan dengan universalisasi modal yang terus makin global, harus mampu mengimbangnya. Dalam wawancara dengan Peter Hallward yang ditulis dengan judul *‘Politics and Philosophy’* (1998), Badiou mengambil idea Marx tentang perlawanan terhadap terhadap universalisasi dan globalisasi ekonomi:

“Emancipatory politics must be at least equal to the challenge of capital. That is Marx’s idea. When Marx says that capital destroys all the old ties, all the ancient sacred figures, that it dissolves everything in the frozen waters of selfish calculation... Marx had already distinguished himself from those who dreamed nostalgically of a resistance to capital rooted in the ancient customs and territories. He called this reactive phenomenon ‘feudal socialism’. Marx was radically critical of this idea, and it’s because he accepted that there were formal similarities between the ambitions of emancipatory politics and the workings of capital. Because we can never go back on universalism. There is no earlier territoriality calling for protection or recovery. (1998: 120-1)

Emansipasi politik atau politik yang menjunjung *maxim* egalitarian merupakan pikiran dalam tindakan. Pelakunya bertindak dengan pikiran demi mencapai kebenaran, mencapai pembebasan 'yang kolektif'. Dalam politik, seseorang bergerak melampaui batas-batas kepentingan, tentu saja termasuk kepentingan modal. Sedang negara, dengan segala keterampilannya mempertemukan bermacam kepentingan, acuh tak acuh terhadap keadilan. Malah negara memusuhi politik sebagai usaha perwujudan keadilan karena politik merupakan respons terhadap negara yang tidak mempedulikan keadilan. Politik selalu menghadapi masalah dan represi di hadapan negara karena dinilai sebagai pemberontakan terhadap negara. Sejarah menunjukkan, orientasi politik yang berurusan dengan keadilan dan kebenaran selalu pada awalnya tampil sebagai pemberontakan terhadap negara. Pernyataan politik yang mengandung kebenaran terbit dalam situasi tidak-hadirnya aturan negara atau sosial.

Metapolitics: Filsafat Tentang Politik Sebagai Pikiran

Kita bisa paham, politik dalam filsafat Badiou bukan tentang bagaimana administrasi negara dijalankan, bukan juga tentang tata-cara kehidupan bersama dirumuskan, atau tentang bagaimana kekuasaan dibagi dalam masyarakat. Badiou tidak bicara tentang politik sebagai antagonisme yang didasari perbedaan antara teman dan musuh dalam pengertian Carl Schmitt. Tidak juga tentang bagaimana para wakil rakyat menyuarakan kepentingan rakyat di parlemen. Apa yang dibahas Badiou adalah *metapolitics*, yang secara kasar saya artikan sebagai politik tentang politik, atau pikiran politik tentang politik sebagai pikiran. Ini adalah konsekuensi logis dari politik sebagai kajian filsafat. Tentang pengertian *metapolitics*, Badiou (2005: xxxix) menulis:

“By ‘metapolitics’ I mean whatever consequences a philosophy is capable of drawing, both in and for itself, from real instances of politics as thought. Metapolitics is opposed to political philosophy, which claims that since no such politics exists, it falls to philosophers to think ‘the’ political.”

Filsafat tentang politik sebagai pikiran berarti pikiran (politik) tentang pikiran (politik). Berfilsafat tentang politik berarti mengkaji pikiran-pikiran politik yang sudah pernah dihasilkan. Tindakan yang dilakukan dalam *metapolitics* adalah memikirkan pikiran dari politik tertentu yang diterapkan dalam bentuk negara tertentu sebagai tatanan kolektif untuk mencari bentuk tatanan yang baru. Mungkin contoh berikut bisa mengkonkretkan abstraksi saya. Bayangkan negara Indonesia seperti yang tampil

sekarang. Itu adalah terapan dari politik sebagai pikiran yang pernah ada. Jika dikatakan kita melakukan *metapolitics*, maka itu berarti kita memikirkan pikiran-pikiran politik yang diterapkan untuk menata negara Indonesia, mencari kemungkinan-kemungkinan baru untuk menata rakyat Indonesia sebagai 'yang kolektif', menghasilkan pikiran-pikiran baru tentang bagaimana situasi rakyat Indonesia ditata secara baru.

Politik tidak tergantung pada siapa yang memikirkannya. Sebagai pikiran yang menjadi kajian filsafat, politik berurusan dengan kebenaran dan kebenaran tidak tergantung kepada orang yang memikirkannya, juga tidak tergantung pada bahasa yang digunakan untuk mengungkapkan kebenaran. Membiarkan kebenaran tergantung kepada orang atau bahasa sama saja dengan membiarkan situasi tak berubah, hanya berisi pengulangan, tak kebaruan, tak ada kemajuan. Situasi seperti itu tidak memungkinkan adanya politik, tidak memungkinkan pembebasan 'yang kolektif'. Tanpa kebenaran, 'yang kolektif' menjadi subordinasi dari perdagangan uang dan informasi sebab, seperti yang sudah saya sebut terdahulu, tatanan 'yang kolektif' diserahkan kepada negara sebagai 'metastruktur' penata 'yang kolektif'. Kita ingat, Badiou menemu-kenali negara didasari oleh keniscayaan ekonomi yang bekerja dengan logika modal.

Negara sebagai tatanan 'yang kolektif' selalu lebih besar dari yang ditatanya. Sebagai representasi dari 'yang kolektif', negara selalu lebih superior dari presentasi-presentasi yang dicakupnya. Kelebihan (*excess*) kekuasaan negara ini adalah kesalahan sebab representasi tidak setara dengan presentasi; dengan kata lain, salah representasi. Seberapa besar kesalahan yang dikandung kekuasaan negara perlu diukur, perlu dipastikan. Politik yang bersentuhan dengan kebenaran memastikan besar kesalahan itu dan menera sebuah ukuran bagi kekuasaan-super yang dikandung negara. Kejadian politik mengiterupsi kesalahan subjektif kekuasaan negara, menata kembali negara dan kekuasaannya. Kejadian politik mendorong negara menampilkan dirinya, membuka tabirnya, membeberkan kelebihan kekuasaannya, menampakkan dimensi represifnya. Tetapi itu sekaligus juga memungkinkan kelebihan kekuasaan negara jadi bisa diukur karena kelebihan itu transparan. Politik memungkinkan distansiasi terhadap negara sehingga 'yang kolektif' dapat melihat kesalahan atau kelebihan kekuasaan negara. Ketika ukuran yang jelas bagi kelebihan itu diperoleh, maka pengurangan atau pembatasan kekuasaan negara dapat dilakukan.

Mungkinkah politik sebagai pembebasan ‘yang kolektif’ dan pencapaian kebenaran ada? Sekali lagi, sejarah menunjukkan kepada kita adanya kemungkinan itu. Saya sudah sebutkan, Badiou mengambil contoh Revolusi Prancis dan Revolusi Kebudayaan Cina, juga Revolusi Rusia 1917 dan Revolusi 1968 di Prancis, sebagai kejadian kebenaran di ranah politik. Setiap kejadian dipahami sebagai ketunggalan oleh Badiou dengan pikiran politik yang dikandungnya masing-masing. Tetapi ada kesamaan yang dapat dikenali, semua kejadian itu menghasilkan ukuran-ukuran yang lebih jelas bagi kekuasaan negara, memungkinkan pembatasan kekuasaan pada negara. Kejadian kebenaran macam itu memang langka dalam sejarah manusia, tetapi itu ada dan cukup untuk memungkinkan dipikirkannya politik sebagai prosedur kebenaran.

Politik sebagai Prosedur Kebenaran

Politik dapat dipahami sebagai alur atau peristiwa dalam kehidupan sosial. ‘Ada’ dalam politik bukan dunia keseluruhan, melainkan ‘Ada’ atau situasi di wilayah sosial, ‘Ada’ dalam arti ‘yang kolektif’. Subjek sebagai relasi tak langsung antara dunia dan kejadian, tepatnya sebagai relasi tak langsung antara jejak dan tubuh (*body*), dalam politik adalah subjek politik: orang yang setia pada keyakinan bahwa sebuah kejadian politik merupakan struktur situasi yang tepat untuk membebaskan ‘yang kolektif’ dari rezim-rezim di luarnya.

Kejadian politik, seperti juga kejadian yang lain, menghilang dan hanya dapat dikenali dari jejak-jejaknya. Ada banyak kekosongan dalam jejak-jejak itu. Subjek politik adalah orang (dengan segala kondisi yang melingkupinya sebagai himpunan) yang mengisi kekosongan itu dengan menunjukkan bahwa "ada sesuatu di sana yang merupakan kebenaran". Tetapi sesuatu itu tak dapat dinamai sebab ia berasal dari kejadian yang tak terpahami, tak bisa diputuskan apa yang sesungguhnya berlangsung. Subjek kebenaran dalam politik membuat aksioma atau hipotesis tentang sesuatu yang berlangsung dalam kejadian itu. Mereka berani memutuskan diri dari *status quo*. Mereka menambahkan suplemen pada situasi yang tak terpahami itu, pada jejak-jejak kejadian. Mereka menggambar kejadian sebagai lukisan yang utuh dan memperjuangkan perwujudan keutuhan itu dalam dunia. Mereka berjuang tanpa kepentingan, hanya dengan kapasitas kemanusiaannya yang khas, dengan pikiran yang didasari aksioma egalitarian. Tambahan itu merupakan sesuatu yang baru dan dapat

berfungsi untuk mencapai kesetaraan setiap orang, mewujudkan keadilan.

Dalam *Being and Event* (2005), Badiou menjelaskan bahwa kebenaran merupakan proses militan yang dimulai dari waktu dan tempat khusus dalam sebuah situasi, lalu setahap demi setahap mencapai transformasi situasi itu yang sejalan dengan bentuk-bentuk baru dari prinsip-prinsip egalitarian. Hanya komitmen murni, terpisah dari mediasi psikologis, sosial atau objektif mana pun, yang dapat menjadi kendaraan yang mencukupi untuk sebuah kebenaran, tetapi secara resiprokal, hanya sebuah kebenaran universal yang memadai dan berkualitas yang berharga untuk dikejar komitmen macam itu. Hanya kebenaran yang dapat menggugah dan memunculkan subjek dengan komitmen yang sungguh-sungguh. Itu juga yang terjadi dalam politik. Subjek-subjek politik berkomitmen murni dengan sungguh-sungguh mewujudkan aksioma egalitarian.

Kebenaran yang dicapai dengan politik sebagai prosedurnya adalah sesuatu yang baru; sesuatu yang baru diungkap, baru dikenali, baru ditemukan. Apa yang disebarkan, apa yang diulang adalah pengetahuan, bukan kebenaran. Membedakan pengetahuan dari kebenaran, bagi Badiou, adalah hal yang esensial. Lebih jauh dari itu, kebenaran harus disajikan kepada pikiran bukan sebagai putusan (*judgment*) atau proposisi, melainkan sebagai proses nyata. Apa yang dipikirkan atau dikatakan bukanlah kebenaran, melainkan representasi kebenaran. Agar proses kebenaran mulai, sesuatu harus terjadi. Pengetahuan hanya memberi kita pengulangan, hanya menunjukkan apa yang sudah ada. Untuk tercapainya kebenaran melalui politik, harus ada kesetiaan kepada kemungkinan, kepada yang tak teramalkan, tak terkalkulasi, kepada apa yang mungkin melampaui itu semua, kepada kejadian politik.

Sebuah kejadian terkait dengan gagasan yang tak-dapat-diputuskan, yang tak dapat dinilai dengan aturan yang ada. Badiou menyatakan, kejadian milik situasi. Kita tak dapat menentukan kejadian, jika dapat kita putuskan benar atau salah, maka itu bukan kejadian, melainkan sesuatu yang dapat diduga dan dikalkulasi dalam situasi. Sebuah kejadian tak dapat diberi putusan benar atau salah. Kejadian kebenaran dimulai dengan pertarungan, dimulai dari kejadian yang tak-dapat-diputuskan. Orang harus bertaruh terlebih dahulu untuk menghasilkan kebenaran. Kebenaran dalam politik dimulai dengan aksioma egalitarian, lalu diwujudkan setahap demi setahap dengan kesetiaan kepada komitmen murni, kepada kejadian, hingga transformasi kenyataan sesuai dengan aksioma itu. Tak ada aturan yang bisa menjelaskan penyebabnya karena

aksioma adalah pernyataan yang ditentukan secara arbitrer di luar aturan pembentukan pengetahuan apapun. Aksioma diformulasi dalam sebuah pilihan murni, komitmen pada kemungkinan, butir demi butir; pilihan tanpa konsep, pilihan murni yang bebas dari dugaan atau asumsi lain yang mendahuluinya, tanpa indikasi dari istilah-istilah yang diajukan, dan tanpa petunjuk yang dapat mengenalinya. Dengan ini kejadian adalah awal absolut dari situasi baru, awal dari 'Ada' sebagai himpunan generik. 'Ada' ini tidak memiliki formula khas bagi keberadaannya; tampil sebagai presentasi yang tak dapat direpresentasi, bahkan tak dapat dinamai.

Badiou menempatkan politik sebagai salah satu prosedur kebenaran (selain sains, seni dan cinta) karena politik adalah pikiran, sebagai modus khas yang ada pada manusia untuk mencapai kebenaran dan menggerakkan manusia mencapai kebaruan. Politik, dalam telusuran Badiou, sejak awal merupakan prosedur bagi filsafat untuk bertemu dan memandangi kebenaran. Dengan mengembalikan kepada pengertiannya yang diterakan filsafat, politik selalu merupakan prosedur bagi kebenaran. Klaim Badiou tentang politik ini saya kira merupakan salah satu jejak dari filsafat Platonik. Rumusan tentang filsafat dan hubungannya dengan kebenaran untuk pertama kalinya memang kita temukan dalam dialog-dialog Plato. Saya kira Badiou menemukannya hasrat filsafat yang berdimensi revolusi, logika, risiko dan universal dari karya-karya Plato. Itu, barangkali, karena dari sanalah catatan tentang awal filsafat bisa kita temukan. Plato memang yang pertama kali, sejauh yang tertulis, mengisahkan jejak-jejak arkhaik filsafat dan ia ikut menapaki jejak-jejak itu.

Perlawanan terhadap Ketidakmungkinan, Bantahan terhadap Ketakmestian

Pembacaan terhadap Badiou memberi saya pemahaman tentang politik sebagai perlawanan terhadap 'yang tidak mungkin' (*impossible*) yang berkontradiksi dengan 'yang mungkin' (*possible*). Ketidakmungkinan menjadi dasar dari politik, dalam arti politik dimulai dengan membayangkan kemungkinan-kemungkinan dari 'yang tidak mungkin'. Seberapapun besarnya kekuatan rezim menguasai 'yang kolektif', politik selalu mencari kemungkinan untuk melawannya. Betapapun muskilnya situasi penindasan diubah, politik mencari celah kemungkinan mengubahnya, membebaskan yang kolektif. Ketika dalam situasi, misalnya, ada pernyataan "Rakyat tidak boleh melawan raja" maka politik mencoba kemungkinan "Rakyat boleh melawan raja." Atau menghadapi pernyataan

“Negara (sebagai yang absolut) tidak mungkin dihilangkan” maka politik bisa mencari kemungkinan yang lebih ekstrem “Negara mungkin dihilangkan.”

Pemahaman politik sebagai kemungkinan, dalam abstraksi saya, membedakan Badiou dari pemikir politik posmodern dan turunannya. Bisa disebut para pemikir itu di antaranya Lyotard, Foucault dan Derrida, juga Laclau dan Lefort. Dalam pemahaman saya, mereka memahami politik sebagai ketidakniscayaan atau ketakmestian (*contingency*). Filsafat politik mereka (jika bisa dibilang begitu) sebagai perlawanan terhadap keniscayaan (*necessary*). Saya kira perbedaan ini sangat esensial. Implikasinya, Badiou melihat adanya kemungkinan pencapaian kebenaran melalui politik, pihak lain menyatakan pencapaian itu tidak mungkin.

Begitu perinciannya. Bagi para pemikir posmodern dan turunannya, makna selalu merupakan hasil konstruksi yang bisa dibongkar kembali atau, dalam istilah Derrida, didekonstruksi. Tak ada definisi universal dari setiap kata, tak ada konsep universal. Tak ada makna yang tetap. Tak ada struktur yang mantap. Mereka menolak prinsip identitas ‘X adalah X’. Mereka membantah setiap pernyataan universal-afirmatif. Jika yang universal-afirmatif salah maka kontradiksinya yang benar yaitu yang partikular-negatif sekaligus menegaskan bahwa X tidak mesti X. Dengan demikian, segala sesuatu tidak mesti sebagaimana yang sudah ditetapkan. Implikasinya ‘X mungkin X’ bisa saja, tetapi hanya dalam kondisi tertentu. Begitu juga dengan ‘X tidak mungkin X’. Dengan menetapkan ketidakmestian sebagai asumsi dasar maka yang universal tak pernah bisa diterima.

Jika diterapkan dalam politik maka politik adalah ketidakmestian dan dengan demikian tiada keniscayaan dalam politik, baik singular maupun universal. Dengan Pernyataan “Politik pasti membebaskan ‘yang kolektif’ dari dari rezim-rezim di luar dirinya” tak akan pernah bisa diterima. Begitu juga dengan “Kejadian politik mesti menjadi suplemen bagi tercapainya kebenaran melalui politik” dan “Subjek pasti mencapai kebenaran dalam politik”. Semua aksioma yang awalnya singular lalu dengan metode *forcing* menjadi universal menjadi tidak mungkin bagi pemikiran politik posmodern. Ketidakmestian menjadi penentu di sini, menjadi rezim. Jika itu diterapkan dalam politik, itu adalah rezim luar yang menguasai ‘yang kolektif’.

Ini jelas beda dengan Badiou yang memandang politik sebagai kemungkinan pembebasan ‘yang kolektif’. Badiou berangkat dari kemungkinan, dari kejadian yang

singular bergerak menuju universal. Ia tidak menutup kemungkinan ada yang universal, menghargai aksioma atau sumpah yang hendak dipegang teguh oleh orang-orang. Memahami politik sebagai kemungkinan dalam pengertian Badiou juga menjaga dari kecenderungan universalisasi ideologis sebab politik selalu dimulai dari ‘yang tunggal’ sebagai presentasi, tidak berangkat dari representasi.

Bagi Badiou, justru politik hendak membongkar representasi dari situasi, membongkar kelebihan yang juga adalah kesalahan kekuasaan negara. Yang universal dapat dicapai dalam politik jika dan hanya jika berangkat dari yang tunggal; yang universal sebagai presentasi. Badiou selalu curiga terhadap setiap representasi. Ia menolak demokrasi parlementer yang bekerja dengan representasi, saya kira, karena alasan ini. Politik selalu harus berjarak dengan negara karena politik adalah presentasi sedangkan negara adalah representasi. Keberjarakan itu memungkinkan pembebasan ‘yang kolektif’ dari rezim-rezim di luar dirinya.

Seberapa mungkin politik dapat melakukan pembebasan itu? Tak terhingga, *infinite*. Tak ada batas yang dapat dinamai sebagai titik henti bagi pembebasan ‘yang kolektif’ oleh politik. Sampai kapan dan di mana pun, politik selalu merupakan kemungkinan untuk membebaskan ‘yang kolektif’ setiap kali ada rezim luar yang menguasainya. Politik tampil sebagai watak tak terbatas dari situasi. Ini merupakan efek dari watak kolektif kejadian politik. “Setiap politik memerintahkan atau menghadirkan ketakterbatasan situasi” (Badiou, 2005: 142). Situasi diartikan oleh Badiou sebagai kemajemukan yang terpresentasi (*presented multiplicity*). Presentasi dari kemajemukan merupakan kemajemukan juga. Di bawah rezim presentasi, yang ada di dunia tampil sebagai yang majemuk, beragam, berbeda-beda. Ini berarti, situasi adalah kemajemukan yang majemuk. Ontologi Badiou merumuskan ‘Ada’ (*being*) sebagai situasi. Dari sini dapat dipahami ‘Ada’ merupakan inkonsistensi, tepatnya kemajemukan inkonsisten sebab ada keberagaman di dalamnya yang tak tunduk pada hukum atribusi tertentu. ‘Ada’ dapat merujuk apa saja tanpa batasan yang jelas, tak terbatas. Setiap situasi, dengan demikian, tak terbatas, tak terhingga. Tetapi, hanya politik yang dapat menghadirkan ketakterhinggaan situasi secara langsung, sebagai universalitas subjektif, sebab politik mencakup pikiran dari semua yang tampil (‘yang kolektif’, kebersamaan orang-orang) dalam situasi. Mengutip Badiou (2005: 143), “...*politics treats the infinite as such according to the principle of the same, the egalitarian principle.*”

Politik merupakan prosedur pengelolaan 'yang kolektif' oleh dirinya sendiri sehingga setiap 'yang tunggal' mendapat perlakuan yang sama. 'Yang kolektif' terdiri dari 'yang tunggal' tetapi dalam politik setiap 'yang tunggal' menyatukan diri dengan yang tunggal lainnya sebagai kebersamaan, diperlakukan sebagai kesatuan, sebagai yang kolektif. Setiap 'yang tunggal' mendapat perlakuan yang sama di dalam 'yang kolektif' dengan keadilan sebagai prinsipnya.

Kita bayangkan sekumpulan orang yang tinggal bersama di sebuah lokal, katakanlah, untuk lebih kongkret, orang Indonesia. Setiap orang Indonesia sebagai individu terkumpul sebagai 'yang kolektif', sebut saja rakyat Indonesia. Bagaimana kehidupan bersama dalam 'yang kolektif', sebagai rakyat Indonesia, dapat berlangsung dengan rakyat Indonesia sebagai pengelolanya dan setiap orang Indonesia mendapat perlakuan yang sama? Menggunakan Badiou, jawabannya adalah dengan politik sebab politik adalah prosedur untuk mencapai situasi dengan karakteristik 'yang kolektif' mengelola dirinya sendiri, bebas dari rezim apapun di luar dirinya. Politik mencari kemungkinan untuk menjadikan 'yang kolektif' sebagai representasi dari semua 'yang tunggal' tanpa menghilangkan presentasi dari setiap 'yang tunggal'. Setiap orang dalam politik dapat menampilkan subjektivitasnya dalam kebersamaan. Politik memungkinkan 'yang kolektif' tampil sebagai Kita, sebagai kebersamaan intersubjektif yang meleluaskan anggota-anggotanya untuk menampilkan diri.

Fiksi dan Heroisme dalam Pemikiran Politik Badiou

Saya teringat pada *Lord of The Ring* karya Tolkien yang mengisahkan konflik panjang antara yang baik dan yang jahat. Fiksi Tolkien itu bisa jadi paralipsis dari pemikiran politik Badiou. Dalam tafsir saya, politik dalam terang Badiou memang mengandung unsur fiktif dan heroisme di dalamnya.

Tolkien mengeksplorasi sisi positif dan negatif kekuasaan, heroisme, dan peran pertemanan. Tokoh utamanya, Frodo Baggins, bersama teman-temannya kaum Hobbit percaya bahwa tanggung jawab mereka adalah menyelamatkan *Middle-earth* yang analog dengan bumi di jaman modern dari kendali Sauron, Tuan dari segala kejahatan. Sauron bernafsu menguasai *Middle-earth* lewat penguasaan terhadap 19 cincin kekuasaan yang dalam tafsiran saya merupakan metafora dari daya hidup kelompok-kelompok yang hidup di *Middle-earth*.

Frodo dan kawan-kawannya berjuang bukan untuk mencari harta atau kekuasaan, melainkan menghancurkan apa yang dianggap paling berharga buat Sauron, *the One Ring*. Dengan cincin pamungkas itu, Sauron hendak memperkuat penguasaannya terhadap 19 cincin kekuasaan. Tujuan dari perjuangan mereka adalah mempertahankan *Middle-earth* sebagai 'yang kolektif' tempat hidup beragam makhluk seperti *hobbits*, peri (*elves*), penyihir, orang kerdil, *ents*, *orcs*, *ringwraiths*, dan makhluk aneh lainnya, menjaga 'yang kolektif' agar tidak dikuasai oleh rezim di luar dirinya.

Sauron sebaliknya, ingin menguasai *Middle-earth*, menjadikannya sebagai tempat yang diisi oleh makhluk-makhluk dengan pikiran seragam dan objektif. Ia ingin menguasai pikiran semua makhluk, mendominasi hasrat mereka demi kepentingannya sendiri. *Middle-earth* yang majemuk hendak dibikin jadi kesatuan yang objektif oleh Sauron di bawah kekuasaannya. Ia mengabaikan subjektivitas setiap makhluk yang hidup di *Middle-earth*, memaksa situasi terstruktur seperti maunya sendiri. Ia hendak menjadi rezim dari yang kolektif, rezim yang berada di luar yang kolektif.

Perjuangan Frodo dan kawan-kawannya merupakan metafor dari perjuangan 'yang kolektif' membebaskan diri dari rezim-rezim di luar dirinya. Seperti dalam politik, mereka bertemu dan menentukan strategi perjuangan, merumuskan cara-cara melawan kekuatan-kekuatan di luar 'yang kolektif' dengan melibatkan semua unsur 'yang kolektif'. Mereka menjadikan 'yang kolektif' sebagai representasi dari setiap agennya dengan merujuk kepada pikiran subjektif yang dimiliki oleh semua agennya. Dipilihlah Frodo sebagai agen yang bertugas menghancurkan *the One Ring* sebab ia tak punya kepentingan lain selain membebaskan *Middle-earth* dari rezim di luar 'yang kolektif'. Mereka menentukan siapa yang akan menemani Frodo sebagai perwakilan dari 'yang kolektif'. Terpilihlah delapan agen lainnya sebagai pengantar cincin dengan pertimbangan ada sembilan *Ringwraiths* (hantu dari orang yang diperbudak Sauron) atau *Nazgul* yang diperintahkan Sauron mencari *the One Ring*. Sembilan pengantar cincin itu terdiri dari empat hobbit (Frodo, Sam, Pippin dan Merry), Legolas dari kaum peri, Gimli si orang kerdil, dua manusia Aragorn dan Boromir, dan Gandalf mewakili para penyihir. Kawanan ini menunjukkan berbagai aspek heroisme dalam perjalanan mereka. Ada yang berkorban nyawa seperti yang dilakukan Boromir. Mereka bertahan dari godaan kekuasaan. Aragorn selalu merisikokan diri untuk menyelamatkan orang lain, menunjukkan kepemimpinan yang tinggi dan selalu siap mengorbankan kepentingan

pribadinya demi ‘yang kolektif’. Frodo dan tiga hobbit lainnya menunjukkan komitmen yang dipegang terus. Meski awalnya mereka tidak betul-betul paham akan bahaya yang mereka hadapi, mereka tetap setia pada perjuangan. Frodo yang menjadi fokus usaha penguasaan pikiran oleh Sauron bertahan dari godaan fisik dan mental. Ketahanan diri yang tinggi menjaganya untuk tetap setia. Heroisme Frodo terletak pada ketahanan dirinya. Tentu saja mereka tidak hanya bersembilan memperjuangkan pembebasan *Middle-earth*. Bersama mereka individu-individu lain secara kolektif juga melakukan perjuangan, mendukung sembilan pengantar cincin itu. Heroisme menyebar ke seluruh penjuru *Middle-earth*. Para warganya ikut berjuang dengan pikiran subjektif yang sama, membebaskan ‘yang kolektif’.

Pejuangan melawan godaan secara manusiawi digambarkan di sana. Dalam perjuangan politik, selalu ada godaan, juga pengkhianatan dan teror. Tak jarang pula ada halusinasi, menganggap simulakrum sebagai kenyataan dan terjerat dalam kepentingan-kepentingan semu. Tetapi, dengan kesetiaan atau dalam istilah Badiou, *Fidelity*, perjuangan itu sampai kepada pencapaian tujuan, sampai pada kebenaran: membebaskan ‘yang kolektif’ dari rezim-rezim di luar dirinya.

Politik sebagai perjuangan heroik, saya kira, kental dalam pemikiran Badiou. Kejadian politik dipaparkan sebagai kejadian luar biasa dalam pemikiran Badiou. Simon Critchley (2005) dalam diskusinya dengan Badiou cemas bahwa karakter luar biasa dari kejadian politik yang dikemukakan Badiou akan mengubah politik menjadi tindakan heroik. Ada rayuan untuk politik yang besar dan hebat dalam pemikiran Badiou. Critchley cemas sebab Badiou menunjukkan kecenderungan Heideggerian dan estetika nasional yang berasosiasi dengan tradisi Jerman.

Kenneth Surin (2005) dalam tulisannya “*The Ontological Script of Liberation*” mengungkapkan kepedulian yang mirip dengan Critchley. Bagi Surin, masalah lain dari pandangan politik sebagai kejadian luar biasa adalah hak untuk memobilisasi sumberdaya-sumberdaya kekuasaan dan kekerasan yang mungkin digunakan, seperti apa yang dilakukan Bush junior setelah peristiwa 11 September, memobilisasi opini publik Amerika tidak hanya untuk merespon Al-Qaeda, melainkan juga mempromosikan seluruh agenda sayap-kanan Partai Republik, termasuk menyerang dan menguasai Irak.

Saya mengira-ngira tanggapan Badiou. Sejauh yang saya bisa bayangkan,

kejadian sebagai awal absolut yang berbeda dari apa yang ada sebelumnya, sebagai yang luar biasa, perlu diletakkan dalam konteks ontologi Badiou. Awal absolut itu adalah awal dari 'Ada' sebagai situasi, sebagai awal dari kemungkinan-kemungkinan baru untuk merepresentasikan situasi dengan keragaman dan ketunggalannya di bawah aksioma egalitarian.

Badiou berbeda dengan Heidegger yang membayangkan kebenaran sebagai pengungkapan 'Ada' dan menempatkan pikiran yang memungkinkan tercapainya kebenaran pada sisi lain dari 'Ada' yang belum terungkap. Badiou menekankan kebaruan dalam pengertian keterputusan dengan sejarah yang diperjuangkan oleh subjek sebagai orang yang berani putus dengan *status quo*. Justru yang dalam pemikiran Badiou, politik sebagai prosedur kebenaran adalah interupsi terhadap pengulangan-pengulangan di dunia politik, bukan mempertahankan tradisi atau primordialitas. Aksioma egalitarian yang juga dikandung oleh banyak kisah-kisah heroik memang punya juga sifat fiktif sebab yang baru tak ada dalam kenyataan, perlu dikarang untuk menghasilkannya. Namun sejauh fiksi itu adalah sejalan dengan aksioma egalitarian, politik tetap bisa berjalan sebagai prosedur kebenaran.

Badiou juga menekankan bahwa politik justru berhadapan dengan negara sebagai penghasil ukuran yang jelas dari kekuasaan negara. Politik harus berjarak dengan negara dalam usaha membebaskan 'yang kolektif' dari rezim-rezim di luar dirinya, termasuk dari negara yang cenderung dikuasai oleh logika modal.

Apa yang diajukan Badiou juga tentu sangat berbeda dengan apa dinyatakan dan dilakukan Bush. Presiden Amerika yang kerap membawa Tuhan dalam pidatonya itu sama sekali tidak bersih dari kepentingan. Ada banyak kepentingan yang ia jadikan dasar praktek kekuasaannya, baik tersurat maupun tersirat. Dengan menjadikan agama sebagai pertimbangan tindakan-tindakan politis atau kejayaan Amerika Serikat, jelas Bush tidak bertindak berdasarkan kapasitas kemanusiaan generik. Bush bahkan, dalam penilaian saya, mengabaikan aksioma egalitarian dan melecehkan pikiran dengan pernyataannya, "*Either you're with us, or against us.*" Aksioma yang ia ajukan mengandaikan keterpecahan 'yang kolektif'. Ia lebih senada dengan Carl Schmitt dalam menarik garis batas antara kawan dan musuh. Kebersamaan yang hendak ia bangun adalah 'Kami', kebersamaan yang mensyaratkan adanya musuh bersama. Sedangkan politik dalam pemikiran Badiou, dalam hemat saya, adalah kemungkinan untuk

mencapai kita; mencapai kebersamaan intersubjektif tempat anggota-anggotanya leluasa menampilkan dirinya.

Daftar Pustaka

- Badiou, Alain. *Infinite Thought*. London: Continuum, 2003.
- _____. "After the Event: Rationality and the Politics of Intervention. An Interview with Alain Badiou." *Prelom* 8 (2007): 180-194.
- _____. *Being and Event*. Translated by Oliver Feltham. London: Continuum, 2005.
- _____. *Briefings on Existence: A Short Treatise on Transitory Ontology*. Translated by Norman Madarasz. Albany, NY: SUNY Press, 2006.
- _____. *Ethics*. Translated by Peter Hallward. London: Verso, 2001.
- _____. "The Event in Deleuze." Translated by Jon Roffe. *Parrhesia*, Number 2 (2007): 37-44.
- _____. *Metapolitics*. Translated by Jason Barker. London: Verso, 2005.
- _____. "Philosophy as Creative Repetition." *The Symptom*, Issue 8 (Winter 2007); http://www.lacan.com/symptom8_articles/badiou18.html.
- _____. *Saint Paul: The Foundation of Universalism*. Translated by Ray Brassier. Stanford: Stanford University Press, 2003.
- Critchley, Simon. "'Fault Lines': Simon Critchley in Discussion on Alain Badiou." *Polygraph* 17 (2005): 295-307.
- Surin, Kenneth. "The Ontological Script of Liberation." In *Theology and the Political: The New Debate*. Edited by Creston Davis, John Milbank, and Slavoj Zizek. Durham, NC: Duke University Press, 2005: 240-266.
- Tolkien, J.R.R. (1993). *The Fellowship of the Ring*, 2nd ed. Houghton Mifflin Company.
- Tolkien, J.R.R. (1993). *The Return of the King*, 2nd ed. Houghton Mifflin Company.
- Tolkien, J.R.R. (1993). *The Two Towers*, 2nd ed. Houghton Mifflin Company.